

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak dan Luas Wilayah

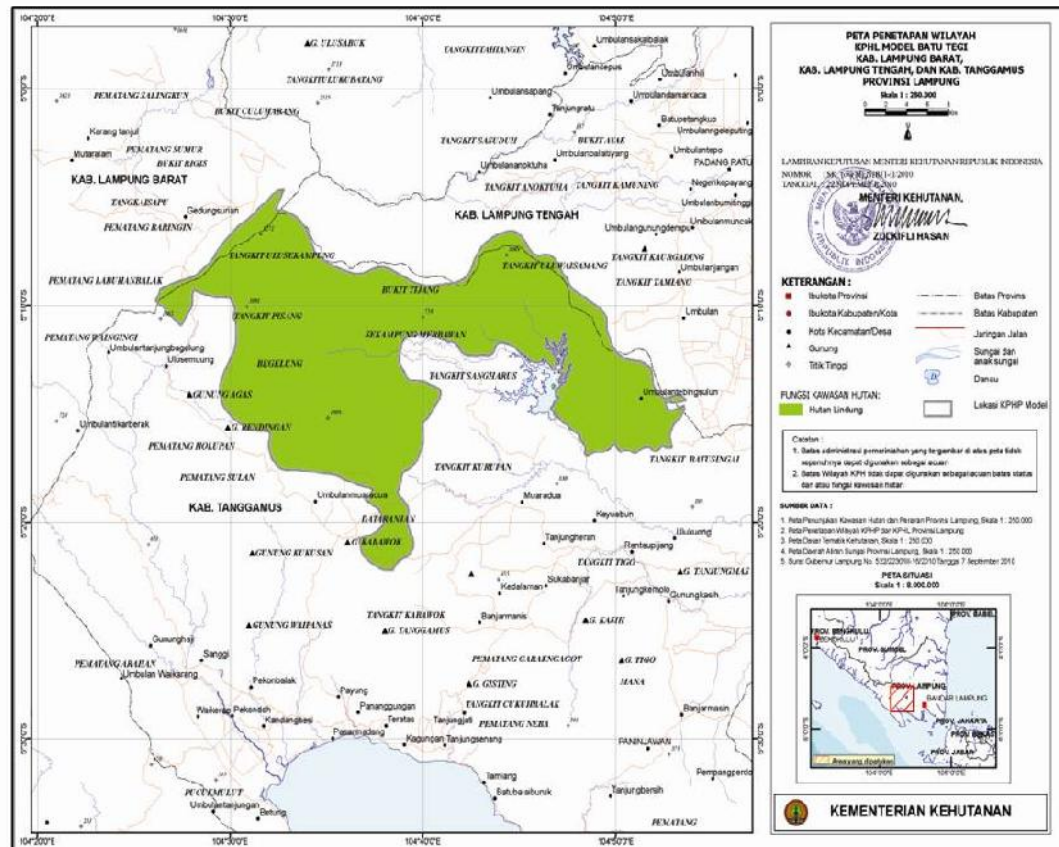
Secara geografis KPHL Batutegi terletak pada $104^{\circ}27'$ - $104^{\circ}55'$ BT dan $05^{\circ}48'$ - $5^{\circ}22'$ LS. Secara administratif KPHL Batutegi, berada di empat Kabupaten, yaitu Kabupaten Tanggamus, Lampung Barat, Lampung Tengah dan Kabupaten Pringsewu. Areal KPHL Batutegi merupakan kawasan hutan lindung yang terdapat di Kabupaten Tanggamus.

KPHL Batutegi meliputi sebagian kawasan hutan lindung register 39 Kota Agung Utara, sebagian kawasan hutan lindung register 22 Way Waya dan sebagian kawasan hutan lindung register 32 Bukit Ridingan. Luas areal kelola KPHL Batutegi berdasarkan SK Menhut Nomor: SK.68/Menhut-II/2010 tanggal 28 Januari 2010 adalah 58.174 Ha (Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, 2013).

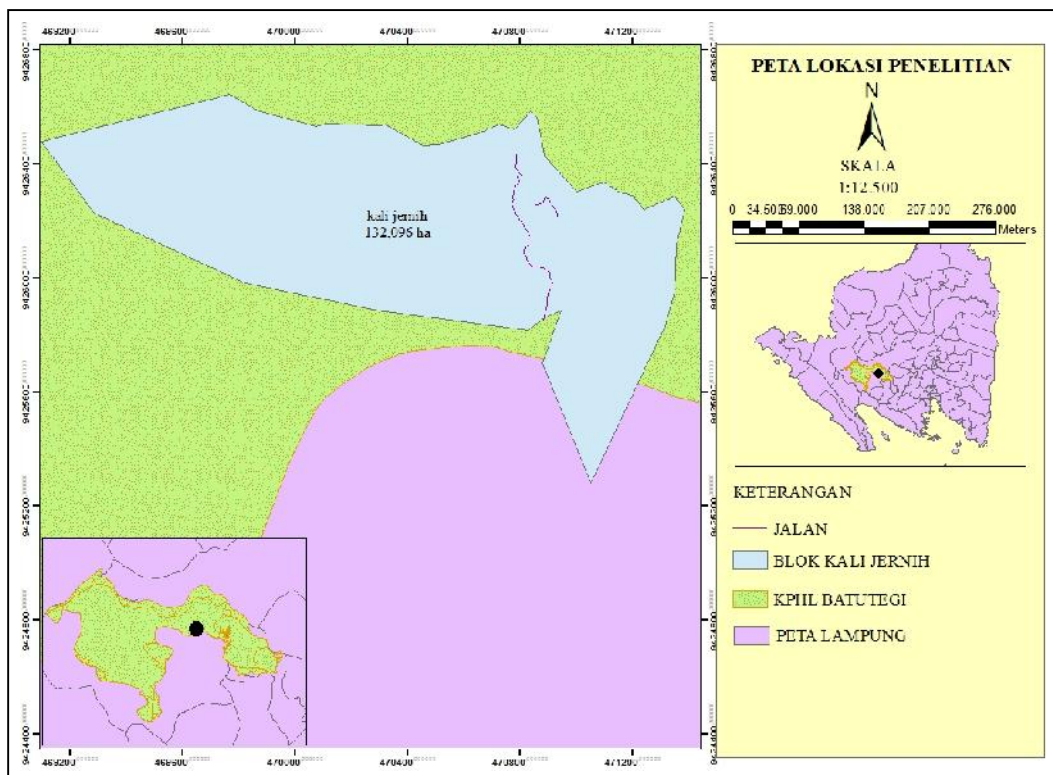
B. Fungsi Kawasan Hutan

KPHL Batutegi merupakan salah satu DAS prioritas di Provinsi Lampung, karena fungsinya sebagai areal tangkapan air dan sumber air bagi irigasi yang mengairi sawah-sawah di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, Metro dan beberapa Kabupaten lain seluas ± 66.533 hektar, sebagai pembangkit tenaga

Listrik dengan kapasitas 28 MW, dan sebagai sumber air baku sebanyak 2.250 liter/detik. Peta KPHL Model Batutegi Lampung dapat dilihat pada Gambar 4 dan peta lokasi penelitian Blok Kalijernih dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 4. Peta KPHL Model Batutegi Lampung skala 1:200.000 (Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, 2013).



Gambar 5. Peta lokasi Blok Kalijernih skala 1:12.500 dengan luas 132,096 ha (Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, 2013).

C. Pemanfaatan Kawasan Hutan

Areal KPHL Batutegi seluas \pm 35.000 hektar dimanfaatkan oleh masyarakat kelompok tani HKm di areal tersebut. Sedangkan, \pm 10.000 hektar dari areal tersebut merupakan kawasan lindung sebagai lokasi pelepasliaran satwa tertentu. Pada lokasi tersebut diketahui terdapat sedikitnya 15 jenis mamalia besar diantaranya siamang (*Symphalangus syndactylus*), simpai (*Presbitis melalophos*), babi hutan (*Sus scrofa*), rusa sambar (*Cervus unicolor*), jejak harimau sumatra (*Panthera tigris sumatrae*), jejak, dan feses beruang madu (*Helarctos malayanus*) dan sedikitnya terdapat 46 jenis burung antara lain elang bondol (*Haliastur indus*), dan rangkong (*Buceros sp*). Jenis tumbuhan yang umum dijumpai untuk tingkatan pohon yaitu terap (*Artocarpus elasticus*), pasang (*Quercus blumeana*), durian

hutan (*Durio zibethinus*), meranti (*Shorea sp*), cengkeh (*Eugenia sp*), dahu (*Dracontolemon sp*), rambutan (*Nephelium sp*), beringin (*Ficus sp*), dll (Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, 2013).

D. Pembagian Wilayah Pengelolaan

KPHL Batutegi dibagi menjadi enam resort yang masing-masing dikepalai oleh satu orang kepala resort.

E. Program Hutan Kemasyarakatan (HKm)

Program HKm yang terdapat di KPHL Batutegi terdiri dari beberapa gapoktan, diantaranya: register 32 sebanyak 5 gapoktan, register 39 sebanyak 11 gapoktan dan Register 22 sebanyak 4 gapoktan. Sepuluh gapoktan telah mendapatkan ijin pengelolaan HKm 2007–2010, empat sedang dalam tahap fasilitasi dan enam sudah diusulkan untuk mendapatkan areal penetapan yang telah diverifikasi oleh Kementerian Kehutanan Pusat Jakarta.

F. Komoditi Unggulan

Saat ini yang diusahakan petani merupakan komoditi unggulan dari wilayah KPHL Batutegi Lampung ini. Komoditi unggulan yang diusahakan oleh masyarakat sekitar areal KPHL Batutegi Lampung antara lain: kopi, lada, kakao, pala, kemiri, dan, durian.

G. Rencana Pengelolaan

Visi KPHL Batutegei “Terwujudnya KPHL Batutegei yang Mandiri berbasis Partisipasi Masyarakat Tahun 2022”. Sedangkan Misi KPHL Batutegei adalah sebagai berikut (Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, 2013).

1. Pemantapan dan optimalisasi pengelolaan kawasan KPHL Batutegei, serta penegakan hukum bidang kehutanan.
2. Rehabilitasi lahan kritis dan peningkatan fungsi lindung.
3. Pengembangan dan peningkatan SDM pengelola KPHL Batutegei.
4. Penguatan kelembagaan dan peningkatan peran Gapoktan (Gabungan Kelompok Petani Hutan) dalam penggarapan lahan hutan.
5. Percepatan dan optimalisasi pemanfaatan, serta pengembangan pengusahaan hasil hutan bukan kayu.